

# SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

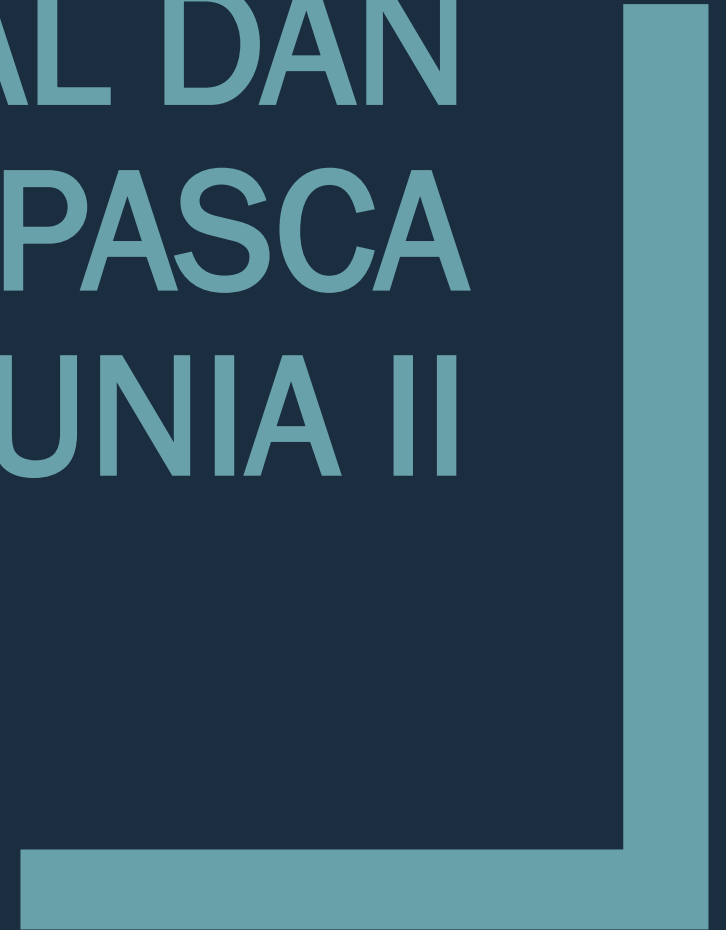
Dra. Eva Kusuma Sundari, MA. MDev.

DISAMPAIKAN DI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA, 18 OKTOBER 2017

# PENDAHULUAN

- Sejarah, salah satu artinya, adalah interpretasi;
- Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
- Istilah “Orde Lama” menyesatkan karena ada 2 periode yang pada prinsipnya saling bertolak belakang:
  - *masa demokrasi parlementer 1949-1959*
  - *masa demokrasi terpimpin 1959-1966.*
- “(Orde) Reformasi” = pengganti (penerus) Orde Baru?

LATAR BELAKANG POLITIK  
INTERNASIONAL DAN  
DALAM NEGERI PASCA  
PERANG DUNIA II



# Gambaran Situasi Dunia setelah Perang Dunia II

Peta dunia berubah, daerah-daerah kolonial menjadi negara baru yang berada di Asia, dan Afrika, yang selama ini merupakan pemasok sumberdaya ekonomi Eropa.

Amerika sebagai pemimpin Blok Barat dan Soviet sebagai pemimpin Blok Timur, sangat membutuhkan sumberdaya besar untuk mengembalikan sumberdaya mereka yang telah terpakai dalam PD II.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, dan baru keluar dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia masih sangat membutuhkan sumberdaya besar untuk memulai pembangunannya. Namun hal ini tidaklah mudah, karena Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan Global antara negara-negara pemenang PD II.

Konflik Global tersebut, kemudian sangat mempengaruhi keadaan dalam negeri Indonesia yang masih muda. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberontakan yang didukung oleh blok Barat maupun Blok Timur.



# SETELAH PROKLAMASI LALU APA?

## ISU-ISU KRUSIAL DALAM KONFERENSI MEJA BUNДАР 1949

### Isu Politik:

Belanda bersikukuh hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan bukan Republik Indonesia



Belanda menolak menyerahkan Niugini Barat (*West New Guinea*) ke Indonesia



Penolakan Belanda itu mengakhiri prospek hubungan yang bersahabat antara Belanda-Indonesia sejak awal perundingan



# SETELAH PROKLAMASI LALU APA? ISU-ISU KRUSIAL DALAM KONFERENSI MEJA BUNДАР 1949

Isu Ekonomi: Sumber: Thee, Kian Wie (2003)

*Pertama*, Belanda memaksakan suatu Perjanjian Keuangan-Ekonomi (*Financieel-Economische Overeenkomst, Finec*) yang akan mengamankan kepentingan-kepentingan bisnis Belanda dan juga penerimaan pemerintah Belanda yang bersumber dari kepentingan bisnis tersebut.

*Kedua*, Belanda menuntut agar Pemerintah Indonesia mengambil alih semua utang baik utang Hindia Belanda sebelum Perang Kemerdekaan maupun utang yang diakibatkan oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda (*Netherlands Indies Civil Administration, NICA*) setelah perang.

Belanda Menuntut utang yang diambil alih sebesar 6,5 miliar gulden



Disepakati sebesar sekitar 4,5 miliar gulden



38 Perusahaan Tembakau

205 Perusahaan Perkebunan teh, karet, dll

22 Perusahaan Perkebunan (paling banyak perkebunan pala)

Nasionalisasi Perusahaan Belanda



Perusahaan Perkebunan Negara Baru 1957

88 PPN

Dengan komoditas utama : Karet, Tembakau, Gula dan aneka tanaman

<http://historia.id/modern/inilah-bidangbidang-usaha-yang-dinasionalisasi>

# PERKEMBANGAN POLITIK 1949-1965



# MASA PERALIHAN 1945-1949

- Belanda terus mengupayakan pembentukan sebuah negara federal di bekas Hindia Belanda selama 1946-1949
- Ketika bentuk negara merdeka hendak dituntaskan pada 1949 perdebatan yang terjadi adalah bukan antara bentuk federal lawan negara kesatuan,
- Perdebatannya: mendukung suatu republik yang merdeka atau bekerja sama dengan kebijakan *divide et impera* Belanda
- Hasilnya: kesempatan semua daerah untuk menolak bentuk federal.
- UUD RIS dicabut dan digantikan UUDS 1950 yang menetapkan bentuk negara sebagai kesatuan





# MASA PEMERINTAHAN PARLEMENTER 1950-1959

- Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
- Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
- Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)
- Kabinet Alisastro Amijoyo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
- Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
- Kabinet Alisastro Amijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
- Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

# DEMOKRASI TERPIMPIN 1960-1965

- Pada tahun 1959, dengan gagalnya konstituante untuk membuat konstitusi baru
- semakin tidak stabilnya politik didalam negeri akibat seringnya pergantian kabinet sehingga menyebabkan program-program kesejahteraan rakyat tidak berjalan dengan baik.
- Presiden Sukarno mengusulkan untuk mengganti UUDS 1950 dengan UUD 1945, yang ditanggapi oleh Konstituante dengan pengambilan suara.
- Dari hasil voting tersebut, 269 orang menyetujui untuk kembali menggunakan UUD 1945, dan 119 orang tidak menyetujui.

# DEMOKRASI TERPIMPIN 1960-1965

- Namun, berdasarkan UUDS 1950, usulan kembali ke UUD 1945 haruslah disetujui oleh 2/3 dari anggota Konstituante.
- Kemudian Presiden menanggapi hasil voting Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit 1959 yang berisi:
  - *Tidak berlaku kembali UUDS 1950*
  - *Berlakunya kembali UUD 1945*
  - *Dibubarkannya konstituante*
  - *Pembentukan MPRS dan DPAS*

Dikeluarkannya Dekrit 1959 menandakan sebagai akhir sistem liberal di Indonesia



Pidato Dekrit Presiden di Istana Merdeka



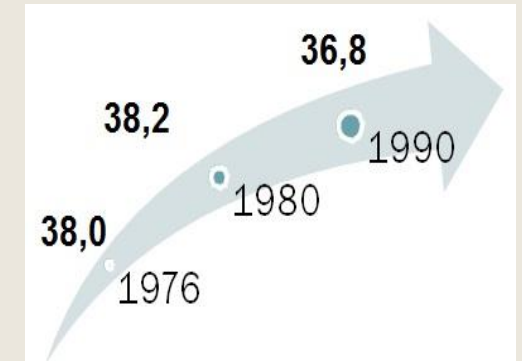
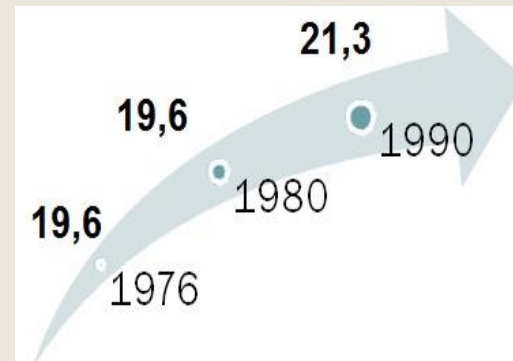
Persidangan Anggota Konstituante

# MASA ORDE BARU

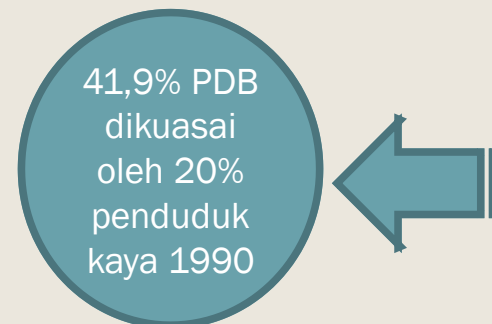
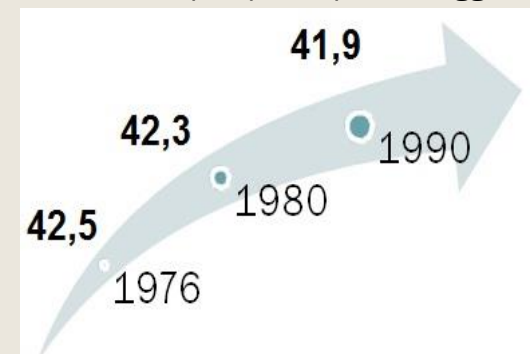
- Stabilitas politik tercapai dengan biaya hilangnya kebebasan berpendapat
- Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dibayar mahal dengan absennya pembangunan politik-sosial-kemasyarakatan
- Hak asasi manusia bukan faktor penting
- Ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan Pulau-pulau Lain diabaikan
- Struktur pasar oligopolistik semakin menguat
- Korupsi, inefisiensi dalam skala besar, sehingga sulit menolak argumen bahwa Orde Baru adalah perwujudan *l'etat c'est moi*.



Persentase Perkembangan Distribusi Pendapatan Kota+Desa  
40% kelompok pendapatan rendah    40% kelompok pendapatan menengah



20% kelompok pendapatan tinggi



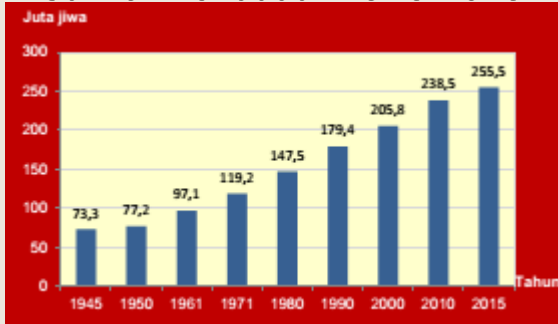
# GAMBARAN PEREKONOMIAN SEJAK MASA KEMERDEKAAN



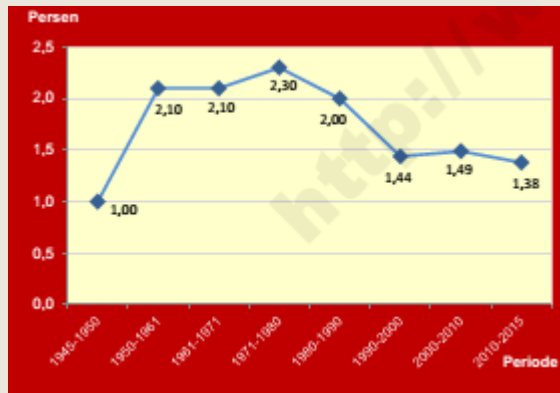


## Kependudukan

### Jumlah Penduduk 1945-2015



### Laju Pertumbuhan Penduduk 1945-2015



## Ketimpangan

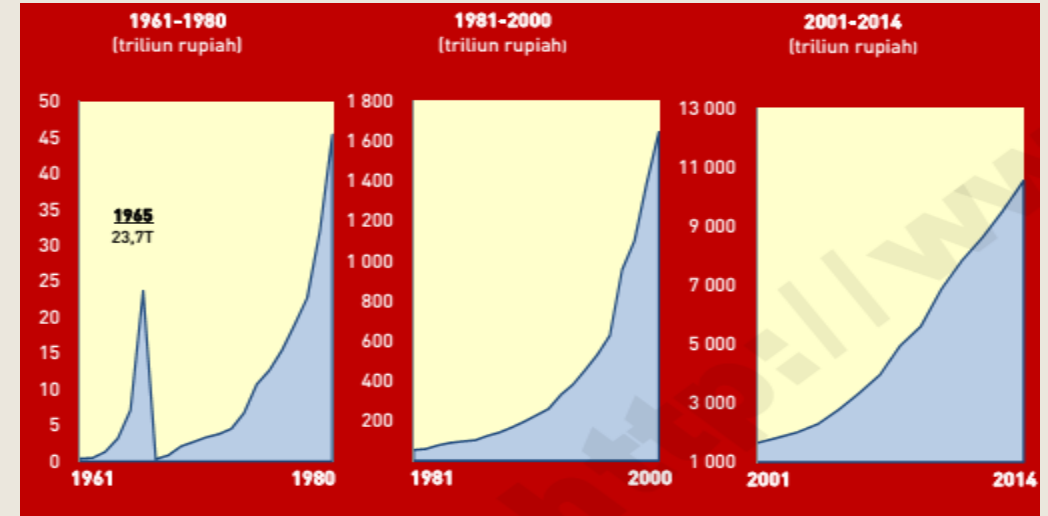
### Indeks Gini

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1976	0,35	0,31	0,34
1978	0,38	0,34	0,38
1980	0,36	0,31	0,34
1981	0,33	0,29	0,33
1984	0,32	0,28	0,33
1987	0,32	0,26	0,32
1990	0,34	0,25	0,32
1993	0,33	0,26	0,34
1996	0,36	0,27	0,35
1998	0,33	0,26	0,32
1999	0,33	0,24	0,31
2002	0,33	0,25	0,32
2003	0,32	0,24	0,32
2004	0,31	0,25	0,32
2005	0,34	0,26	0,34
2006	0,35	0,28	0,36
2007	0,37	0,30	0,38
2008	0,37	0,30	0,37
2009	0,36	0,29	0,37
2010	0,38	0,32	0,38
2011	0,42	0,34	0,41
2012	0,42	0,33	0,41
2013	0,43	0,32	0,41
2014	0,43	0,32	0,41

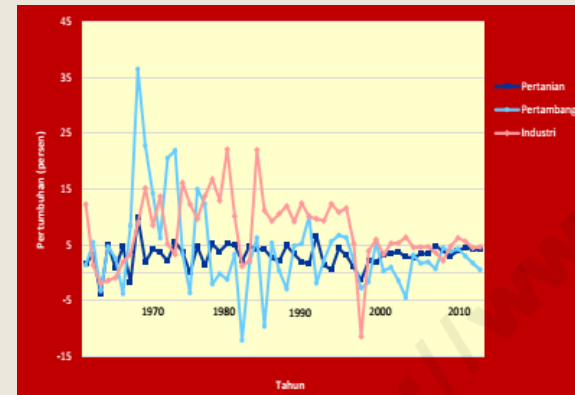


## Ekonomi

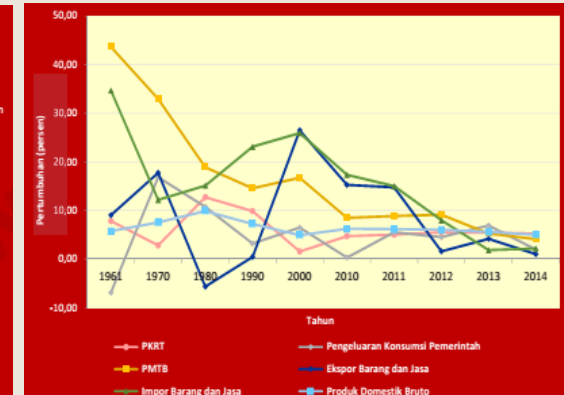
### PDB Atas Dasar Harga Berlaku



### Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Pertambangan, dan Industri (persen), 1961-2014



### Pertumbuhan Komponen Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran, 1961-2014

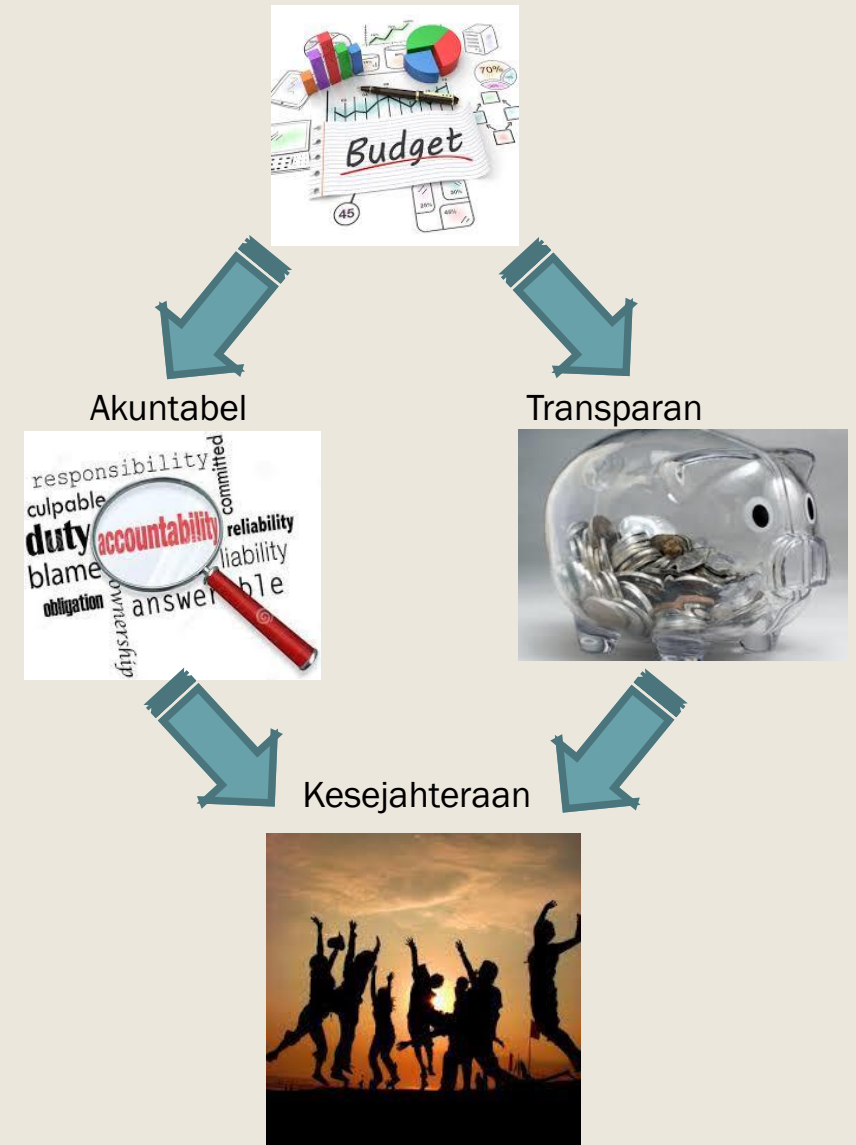


# KEBIJAKAN FISKAL

- Undang-undang keuangan negara Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2003 adalah produk kolonial
  - *Indische Comptabiliteitswet, ICW* (terjemahan bebas: Undang-undang Pertanggungjawaban Keuangan) *staablad 1925 nomor 488* yang ditetapkan pada 1864 dan berlaku pada 1867;
  - *Reglement voor het Administratief Beheer, RAB* (Peraturan Pengelolaan Administrasi) *staatblad 1933 nomor 381*;
  - *Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer, IAR* (aturan tentang tugas dan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan) *staatblad 1933 nomor 320*.
- Peraturan-peraturan di atas disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kolonial demi menjaga kepentingan penjajah, sehingga paradigma kolonialisme menjadi sifat berbagai peraturan tersebut

# KEBIJAKAN FISKAL

- Sejak masa-masa RIS, kabinet parlementer, Demokrasi Terpimpin, bahkan dalam masa Presiden Suharto, yang banyak mendapat apresiasi akibat keberhasilan pembangunannya, tidak tampak ada upaya untuk memperbaiki kondisi ini
- Salah satu akibat dari ketiadaan perundang-undangan tentang keuangan negara yang memadai adalah munculnya dana-dana non-bujeter
- Dana-dana yang *off-budget* berarti secara resmi ada dana yang disembunyikan dari publik dan dari sini berbagai perilaku memburu rente (*rent-seeking*) hidup subur





# KEBIJAKAN FISKAL

- Di masa Orde Baru, selalu dinyatakan bahwa pemerintah tidak mengalami defisit
- Yang terjadi adalah akal-akalan akuntansi di mana utang dan bantuan luar negeri diperlakukan sebagai penerimaan negara.
- Reformasi melahirkan pula reformasi dalam pengelolaan keuangan negara
- UU no 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan negara



## POS PENDAPATAN

PENDAPATAN  
PAJAK

UTANG &  
HIBAH

## POS BELANJA

BELANJA  
PEMERINTAH

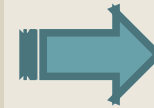
# KEBIJAKAN FISKAL

- UU no 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Saat ini juga sedang dibahas RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam RUU ini nantinya orang Indonesia tidak lagi dipandang sebagai wajib pajak, tetapi sebagai pembayar pajak (*tax payers*)
- Perubahan ini mendasar karena berbeda dari orang yang menjalankan kewajiban, orang yang membayar memiliki hak imbalan atas apa yang dibayarkannya.

# KEBIJAKAN MONETER

Bank Jawa di masa kolonial belum dapat dianggap sebagai bank sentral karena (Van Laanen, 1990):

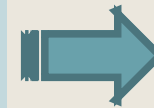
- *Tidak berfungsi sebagai lender of the last resort;*
- *Di Indonesia waktu itu tidak ada pasar uang formal*
- *Bank Jawa lebih banyak mengelola transfer dana dari Indonesia ke Belanda dan sebaliknya*



12 Juli 1951  
Nasionalisasi De Javasche Bank

Dewan Moneter: Bank Indonesia ada di bawah kendali pemerintah  
Salah satu eksekusi dari pengendalian bank sentral oleh pemerintah:  
penyelewengan dana BLBI

UU no 23/1999 yang kemudian diamandemen dengan UU no. 3/2004 mereformasi kebansentralan Indonesia

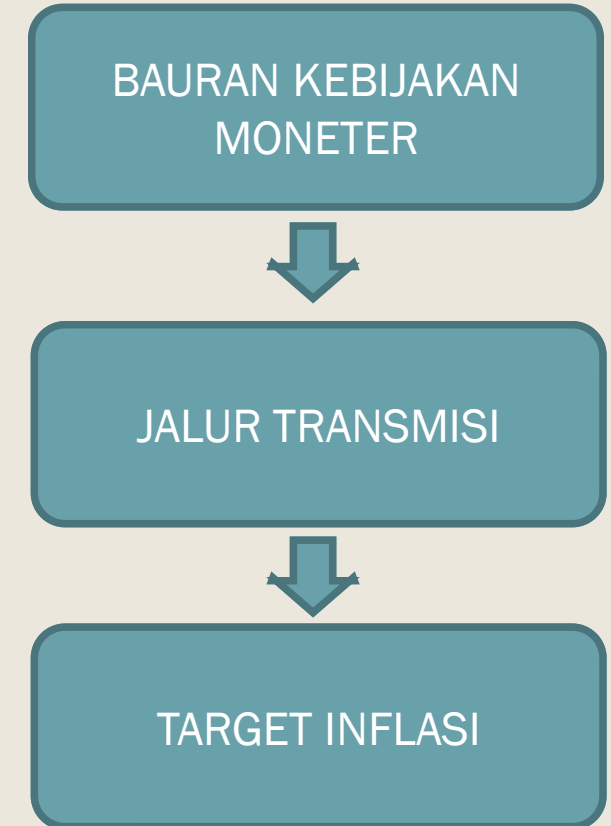


Pemisahan antara peran  
Kebijakan Fiskal dan Moneter

# KEBIJAKAN MONETER

- Independensi bank sentral menjadi penting karena ini adalah satu-satunya lembaga negara yang mengendalikan pasar uang
- Berbeda dengan sektor riil di mana gejolak di satu pasar tidak selalu dengan cepat berimbas luas ke sektor-sektor lain, gejolak di pasar keuangan dapat dengan cepat merembet ke banyak sektor, bahkan melampaui batas-batas negara (contoh: krisis keuangan 1997 yang berawal dari Thailand; krisis keuangan 2007 yang melanda negara-negara maju)
- Meskipun BI kini telah menjadi lembaga negara yang independen, namun tetap berada di bawah payung hukum undang-undang dasar

## TUGAS BANK SENTRAL MENJAGA STABILITAS INFLASI



# KEBIJAKAN MONETER

- Karena itu BI tetap perlu selalu merujuk pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 45, khususnya:
  - *melindungi segenap bangsa Indonesia;*
  - *memajukan kesejahteraan umum; dan,*
  - *mencerdaskan kehidupan bangsa*
- Justru dengan independensinya BI memiliki kekuatan dan keleluasaan besar untuk aktif dalam mewujudkan amanat konstitusi
- Salah satunya adalah geranakan nirtunai (non-tunai)

# KEBIJAKAN MONETER

- Transaksi nirtunai menjadi semakin penting bagi masa mendatang karena:
  - *Transaksi uang tunai tidak selalu tercatat*
  - *Akibatnya membuka peluang penyalahgunaan seperti pemalsuan, pencucian uang atau penghindaran pajak*
  - *Kriminalitas seperti itu terjadi di mana saja di seluruh dunia*
- Selain itu BI juga tengah mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)



# KEBIJAKAN MONETER

- NPG adalah sistem pemroses transaksi pembayaran melalui instrumen elektronik
- Dengan sistem ini masyarakat dapat bertransaksi nontunai di dalam negeri dari bank manapun, dengan instrumen dan saluran apapun
- Tujuan:
  - *Memperbaiki efisiensi infrastruktur sistem pembayaran*
  - *Mengurangi risiko pengelolaan keamanan data transaksi*
  - *Agar pemrosesan debit domestik dilakukan sepenuhnya di Indonesia*
- Butir terakhir penting untuk mengurangi pembayaran ke pihak asing penyedia jasa keuangan (*visa, master, dsb*)







# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Data kuantitatif bagi Perencanaan

- Salah satu temuan pada masa kolonial itu adalah beban pajak bagi orang Eropa dan '*Foreign Orientals*' (kebanyakan Tionghoa) lebih besar daripada yang ditanggung orang Indonesia
- Setelah ditelusuri ternyata didapati bahwa pendapatan kelompok Eropa rata-rata 45 kali lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan pribumi Indonesia (Marks, 2009)
- Untuk pertama kalinya dipublikasikan data pendapatan nasional untuk 1951-1952 pada 1954 hasil estimasi oleh Daniel Neumark yang menjadi penasihat PBB pada Biro Perancang Negara

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Data kuantitatif bagi Perencanaan

- Metode Neumark kemudian dilanjutkan oleh Muljatno Sindhudarmoko yang menghasilkan estimasi untuk neraca nasional periode 1951-1959.
- Di tengah kesulitan ekonomi di awal 1960-an, sejumlah inisiatif baru dalam pengadaan data ditempuh pemerintah seperti:
  - *sensus penduduk yang pertama kali dilaksanakan pada 1961,*
  - *pertama kali pula dilakukan sensus pertanian pada 1963*
  - *sensus industri pada 1964*
  - *pada 1963/64 diperkenalkan sebuah Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas.*
- Sejak kemerdekaan baru pada 1975 para sarjana menyadari adanya koleksi data dalam jumlah besar dalam publikasi kolonial Belanda.

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Di masa Kabinet Sjahrir III (Oktober 1946 – Juli 1947) dibentuk Badan Perancang Ekonomi
- Tugas: merumuskan rencana pembangunan ekonomi jangka dua sampai tiga tahun
- April 1947 dengan Penetapan Presiden dibentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE)
- Hasilnya: dokumen pertama perencanaan dalam sejarah Indonesia merdeka, yaitu Dasar-dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Perang Kemerdekaan menghambat penerapan berbagai rencana pembangunan
- Setelah Kabinet RIS dibubarkan pada 1950 dan Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, pada September 1950 di bawah Kabinet Natsir disusunlah rencana pembangunan yang dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian
- Rencana Urgensi Perekonomian bersifat darurat karena untuk menyusun rancangan pembangunan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit, sementara kebutuhan pembangunan sudah mendesak

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Sebagai kompromi digunakanlah rencana pembangunan yang pernah disusun Belanda dan ditujukan hanya untuk keperluan jangka waktu tiga tahun, dan dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian
- Untuk melanjutkan pembangunan setelah tiga tahun tersebut dibuat rencana lima tahun yang dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
- Januari 1952 dibentuk dua badan baru dengan tugas menyiapkan dan menyusun RPLT
- Badan I: Dewan Perancang Negara. Berfungsi sebagai badan eksekutif

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Dewan Perancang Negara diketuai oleh Perdana Menteri, dengan sekretaris Direktur Biro Perancang Negara, dan anggota terdiri atas Menteri-menteri Perekonomian, Pertanian, Keuangan, Pekerjaan Umum dan Tenaga, Perhubungan, Luar Negeri, Sosial dan Perburuhan
- Badan II: Biro Perancang Negara. Berfungsi sebagai wadah pemikir yang membantu dan memberi saran pada Dewan Perancang Negara
- Di samping kedua badan itu, terdapat pula sebuah kepanitiaan: Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN) yang dipimpin oleh Direktur Biro Perancang Negara. Sesuai namanya kepanitiaan ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi antarinstansi pemerintah.

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN- Lembaga Perencanaan

- Perkembangan situasi politik berdampak pula dalam kelembagaan perencanaan pembangunan.
- Setelah Dekrit 5 Juli 1959, pada Desember 1960 MPRS menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama yang diikuti pengumuman oleh pemerintah bahwa sejak 1 Januari 1961 dimulai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB)
- Salah satu akibat penetapan itu adalah penyatuan perencanaan nasional ke dalam eksekutif: pada 1963 DEPERNAS dimasukkan ke dalam kabinet dan diberi nama baru: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).



DOKUMEN PERENCANAAN



# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Di masa Orde Baru dibentuk Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, Bappenas dipimpin kepala yang tidak merangkap jabatan menteri negara.
- Pada masa Presiden megawati Bappenas kembali menjadi setingkat kementerian. Ini diteruskan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono



# PERENCANAAN PEMBANGUNAN-

## Lembaga Perencanaan

- Di bawah Presiden Joko Widodo, Bappenas direposisi tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian tetapi langsung di bawah Presiden
- Reposisi ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan perencanaan dan penganggaran, di mana Bappenas diminta menjadi fasilitator efektif rencana pembangunan bagi semua kementerian dan lembaga.
- PP no 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menggunakan kaidah *money follow program*
- Dengan PP itu Bappenas kembali berperan penting dalam penyusunan anggaran, bersama dengan Kementerian Keuangan

Terima kasih  
~MERDEKA!

